

Potret Perempuan Suku Dani dalam Pembangunan di Kabupaten Jayawijaya Papua

Vince Tebay

Universitas Cenderawasih

Abstrak: Penelitian ini ingin melihat keterlibatan perempuan Suku Dani dalam pembangunan di Kabupaten Jayawijaya. Fokus penelitian ini ingin melihat sejauh mana keterlibatan perempuan Suku Dani dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan Suku Dani dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan bidang sosial kemasyarakatan belum terlibat secara langsung dan masih sedikit dari empat aspek yang diteliti. Hal ini disebabkan karena beban kerja perempuan dalam lingkup domestik jauh lebih banyak daripada laki-laki, sehingga menyita waktu dan tenaga perempuan. Selain itu budaya dan daya saling yang juga cukup tinggi dibanding daerah lain di Papua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui keadaan perempuan Suku Dani berdasarkan keterlibatan mereka dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa keikutsertaan perempuan Suku Dani dalam empat aspek pembangunan di Kabupaten Jayawijaya masih sangat rendah. Juga pemerintah belum lengkap memiliki data terpilah antara perempuan dan laki-laki guna menunjang pembangunan proses pembangunan yang ada.

Kata kunci: Perempuan, Suku Dani, Pembangunan, Kabupaten Jayawijaya

Abstract: This study attempts to see how well the extent of involvement Dani women have in taking part in the development in Jayawijaya Regency. The focus of this research is to find out the extent of involvement of Dani women in Education, Health, Economy, and Social Sectors. The result of this study indicates that Dani women, viewed from the level of Education, Health, Economy, and Social Sectors have not been directly involved, but only a few involved in the four aspects studied. This is because the workload of women in the domestic sphere is far more than that of men, thus consuming women's time and energy. Besides that, the culture and mutual power are also quite high compared to other regions in Papua. The method used in this research is descriptive qualitative method. The purpose of this study was to determine the situation of Dani women based on their involvement in aspects of Education, Health, Economy and Social sectors. The conclusion from this study shows that the participation of Dani women in four aspects of development in Jayawijaya Regency is still very low. Also the Government does not yet have complete disaggregated data between women and men to support the development of existing development processes.

Key Words: Women, Dani Tribe, Development, Jayawijaya Regency

Korespondensi Penulis:
Vince Tebay, Universitas Cenderawasih, Papua
E-mail: tebayvince@gmail.com

PENDAHULUAN

Kabupaten Jayawijaya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Wamena, biasa disebut Lembah Baliem. Lembah Baliem lebih terkenal sehingga banyak orang menyebut Lembah Baliem identik dengan Jayawijaya atau Wamena. Dalam literatur asing, Lembah Baliem juga sering disebut sebagai Lembah Agung. Batas wilayah Kabupaten Jayawijaya antara lain; sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Yalimo. Sebelah timur berbatasan dengan daerah Pegunungan Bintang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Yahukimo dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Tolikara.

Topografi Kabupaten Jayawijaya berada di hamparan Lembah Baliem, sebuah lembah aluvial yang terbentang pada areal ketinggian 1.500–2.000 meter di atas permukaan laut. Temperatur udara bervariasi antara 14,5 derajat Celcius sampai dengan 24,5 derajat Celcius. Dalam setahun rata-rata curah hujan adalah 1.900 mm dan dalam sebulan terdapat kurang lebih 16 hari hujan. Musim kemarau dan musim penghujan sulit dibedakan. Berdasarkan data, bulan Maret adalah bulan dengan curah hujan terbesar, sedangkan curah hujan terendah ditemukan pada bulan Juli. Lembah Baliem dikelilingi oleh Pegunungan Jayawijaya yang terkenal karena puncak-puncak salju abadinya, antara lain: Puncak Trikora (4.750 m), Puncak Mandala (4.700 m) dan Puncak Yamin (4.595 m). Pegunungan ini amat menarik wisatawan dan peneliti Ilmu Pengetahuan Alam karena puncaknya yang selalu ditutupi salju walaupun berada di kawasan tropis. Lereng pegunungan yang terjal dan lembah sungai yang sempit dan curam menjadi ciri khas pegunungan ini. Cekungan lembah sungai yang cukup luas terdapat hanya di Lembah Baliem Barat dan Lembah Baliem Timur (Wamena). Vegetasi alam hutan tropis basah di dataran rendah memberi peluang pada hutan iklim sedang berkembang cepat di lembah ini. Ekosistem hutan pegunungan berkembang di daerah ketinggian antara 2.000–2.500 m di atas permukaan laut.

Demografi di Kabupaten Jayawijaya adalah orang Dani yang tinggal di lembah Baliem dan biasa disebut sebagai "Orang Dani Lembah". Rata-rata kenaikan populasi

orang Dani sangat rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, salah satu penyebabnya adalah keengganan pada ibu untuk mempunyai anak lebih daripada dua yang menyebabkan rendahnya populasi orang Dani di Lembah Baliem. Sikap berpantang pada ibu selama masih ada anak yang masih disusui, membuat jarak kelahiran menjadi jarang. Hal ini selain tentu saja karena adat istiadat mereka, mendorong terjadinya poligami. Poligami terjadi terutama pada laki-laki yang kaya, yang mempunyai banyak babi. Babi merupakan mas kawin utama yang diberikan laki-laki kepada keluarga wanita. Selain sebagai mas kawin, babi juga digunakan sebagai lambang kegembiraan maupun kedukaan. Babi juga menjadi alat pembayaran denda terhadap berbagai jenis pelanggaran adat. Dalam pesta adat besar, babi tidak pernah terlupakan dan bahkan menjadi bahan konsumsi utama. Sebelum tahun 1954, penduduk Kabupaten Jayawijaya merupakan masyarakat yang homogen dan hidup berkelompok menurut wilayah adat, sosial dan konfederasi suku masing-masing. Pada saat sekarang ini penduduk Jayawijaya sudah heterogen, yang datang dari berbagai daerah di Indonesia dengan latar belakang sosial, budaya dan agama yang berbeda; namun hidup berbaur dan saling menghormati.

Dilihat dari tingkat ekonomi di Kabupaten Jayawijaya, mata pencaharian utama masyarakat Jayawijaya adalah bertani, dengan sistem pertanian tradisional. Makanan pokok masyarakat asli Jayawijaya adalah ubi jalar, keladi dan jagung sehingga areal pertanian mereka dipenuhi dengan jenis tanaman makanan pokok ini. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berusaha memperkenalkan jenis tanaman lainnya seperti berbagai jenis sayuran (kol, sawi, wortel, buncis, kentang, bunga kol, daun bawang dan sebagainya) yang kini berkembang sebagai barang dagangan yang dikirim ke luar daerah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Lembah Baliem adalah areal luas yang sangat subur sehingga cocok untuk berbagai jenis komoditi pertanian yang dikembangkan tanpa pupuk kimia.

Padi sawah juga mulai berkembang di daerah ini karena penduduk Dani sudah mengenal cara bertani padi sawah. Begitupun komoditas perkebunan lainnya yang kini dikembangkan adalah kopi Arabika. Dilihat dari budaya dan pakaian adat Suku Dani di Lembah Baliem Jayawijaya, baju adat kaum lelaki disebut dengan *holim* atau *horem* (koteka) yaitu pakaian atau penutup badan kemaluan bagi pria. Bentuk koteka ialah selongsong mengerucut pada bagian depan. Diikatkan pada pinggang hingga mengarah keatas. Koteka dibuat dari buah labu air yang sudah tua kemudian dikeringkan. Agar

mudah dikeringkan buah labu tua ditanam di dalam pasir kemudian dibakar, sehingga lebih mudah mengeluarkan isi bagian dalam buah labu yaitu berupa biji dan daging labu. Labu air yang tua lebih dipilih untuk digunakan sebagai bahan koteka karena sifatnya cenderung lebih keras, tidak cepat membusuk, lebih tahan lama dibandingkan dengan labu air yang muda. Proses pengeringan koteka biasanya diangin-anginkan di atas perapian. Ukuran dan bentuk koteka disesuaikan berdasarkan keperluan dan aktivitas, bukan berdasarkan kedudukan adat. Bentuk yang lebih kecil dan pendek biasanya digunakan untuk bekerja sehari-hari: hidup bercocok tanam ubi, beternak dan berburu hewan liar untuk mencari makan. Koteka yang berukuran panjang dan biasanya diberi gambar hiasan dan bulu-bulu digunakan saat upacara adat.

Sementara pakain atau baju adat perempuan ada dua jenis, yaitu *yokal* dan *sali*. *Yokal* dipakai oleh kaum wanita (yang sudah menikah), dibuat dari kulit pohon. Warna *yokal* biasanya menyolok berupa cokelat tanah dan kemerahan, bentuknya seperti anyaman dililitkan melingkar memanjang dan dililit melingkar pinggang, hingga menutup bagian pinggul wanita hingga bagian paha. Sedangkan *sali* dipakai oleh gadis atau perempuan Dani yang belum menikah. Warna *sali* hanya terdiri dari satu warna saja, yakni warna cokelat. *Sali* mirip seperti rok wanita, tapi terbuat dari bahan kulit kayu atau daun pandan kering. Bagian dalam lebih panjang dari bagian luar. Cara memakainya adalah dengan melilitkan ke pinggang dan diikat dengan simpul. Namun saat ini rok rumbai tidak hanya digunakan oleh para wanita saja, para pria juga pada kondisi atau acara tertentu kerap menggunakan. Hiasan kepala untuk wanita Suku Dani ada tambahan berupa bulu-bulu burung kasuari, atau dari bahan ijuk dan daun-daun pandanus yang sudah dikeringkan. Perempuan Dani selalu bersama ibunya dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Misalnya menganyam noken, memelihara babi, membantu membawa hasil kebun ke rumah, menjaga adik, mengantar makanan ayah, dan memasak. Bahkan pada masa kini, anak perempuan dapat membantu ibunya menjual hasil kebun ke pasar. Anak-anak perempuan ini tetap diawasi oleh ayah dan kerabatnya di lingkungannya. Malahan mereka akan sangat berperan dalam menentukan jodoh anak wanita.

Adat pernikahan Suku Dani dianggap mewah oleh karena pesta ini merupakan upacara ritual yang unik karena dilakukan secara massal setiap empat hingga enam tahun sekali. Pada saat ritual dimulai, seluruh gadis yang dianggap memenuhi syarat sebagai “pengantin” secara otomatis menjadi mempelai wanitanya. Nilai seorang gadis

ditentukan dari perkembangan fisik mereka dan kemampuannya untuk bekerja. Sedangkan bagi seorang laki-laki, apabila ia telah memiliki jenggot lebat dan beberapa ekor babi itu berarti ia sudah memenuhi syarat untuk memiliki seorang istri. Ia akan membayarnya dengan babi. Sebagian besar gadis dinikahkan melalui perijodohan yang sudah diatur oleh orang tua mereka dan bahkan diatur sebelum mereka memasuki usia remaja karena mereka akan menjadi dewasa sebelum upacara pernikahan selanjutnya digelar.

Perkawinan massal dilakukan dengan memilih tempat upacara di desa mayoritas mempelai perempuan berasal. Tentu saja dipilih desa yang mempunyai batu *kaneke* (para calon mempelai dikumpulkan dan dijaga ketat untuk menghindari terjadinya penculikan). Upacara berlangsung selama 10 hari. Diawali dengan acara merias mempelai wanita beberapa hari sebelum pertemuan resmi kedua mempelai. Dalam acara ini, sang gadis akan menukar *sali* dengan sebuah *yokal*. Di akhir perayaan, para gadis tersebut akan dijemput oleh kerabat laki-laki dan rombongannya. Setelah itu, dilanjutkan dengan upacara makan daging babi ditempat tinggal mempelai laki-laki. Upacara ritual ini diakhiri dengan kedua mempelai memasuki *ebai-ebai* untuk tidur. Selama upacara berlangsung, orang terus-menerus menyanyi, menari, makan dan minum. Daging babi dibagikan sesuai adat sopan santun kepada para kerabat, teman, dan tamu.

Secara adat Ssuku Dani, nilai seorang wanita sangat mahal harganya. Namun kenyataan dalam kehidupan, kadang-kadang nilai perempuan masih dianggap tak berdaya didalam suku ini dan bahkan suku-suku yang ada di Papua umumnya karena wanita atau perempuan tidak membawa marga atau fam dari keluarga. Dalam banyak kasus, perempuan kadang disepelkan seperti dalam pengambilan keputusan adat. Tidak sedikit kekerasan terhadap perempuan juga terjadi dalam Ssuku Dani, oleh karena budaya patrilineal yang sangat kental.

KAJIAN TEORI

A. Pembangunan

Sejalan dengan perkembangan zaman maka sejak tahun 1980-an, isu keadilan dan kesetaraan gender telah menjadi isu global, sehingga dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) telah dirumuskan 8 butir tujuan pembangunan yang terdiri dari: 1) Memberantas kemiskinan dan kelaparan; 2) Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua; 3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 4) Menurunkan angka kematian anak; 5) Meningkatkan kesehatan ibu; 6) Memerangi penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya; 7) Memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan 8) Membangun kemitraan global dalam pembangunan. Kualitas perempuan menjadi dasar untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan bagi suatu bangsa (Parawansa 1998). Pembangunan yang berkelanjutan dapat berlangsung jika semua komponen masyarakat (laki-laki dan perempuan) dilibatkan secara optimal dalam program pembangunan, dengan mengutamakan prinsip pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Menyadari bahwa kualitas hidup sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat pendidikan formal dan nonformal, baik buruknya derajat kesehatan dan gizi, serta ada tidaknya akses terhadap sumber daya pembangunan. Itulah sebabnya, faktor-faktor tersebut diatas saling menunjang dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

Menyadari bahwa kualitas hidup sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat pendidikan formal dan non formal, baik buruknya derajat kesehatan dan gizi, serta ada tidaknya aksesibilitas terhadap sumber daya pembangunan. Itulah sebabnya, faktor-faktor tersebut diatas saling menunjang dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Provinsi Papua, sebagai salah satu daerah yang dipercayakan oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan otonomi khusus, melaksanakan program pembangunan yang seyogyanya mengacu kepada amanat UU No 21 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua, khususnya seperti yang tercantum dalam Bab XII Pasal 47 bahwa perlu “meningkatkan perlindungan dan HAM perempuan” di tanah Papua. Bahkan dalam Bab V pasal 5 ayat 2 dinyatakan secara gamblang bahwa “Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan

terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama”.

Namun jika memperhatikan data secara cermat, ternyata kondisi empiris masyarakat, khususnya perempuan masih jauh dari apa yang diharapkan oleh otonomi khusus itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada pemaparan data yang sangat bersifat umum dan terkesan disamaratakan antara laki-laki dan perempuan. Padahal, dalam menentukan kebijakan pemberdayaan perempuan diperlukan data terpilah tentang laki-laki dan perempuan disegala aspek, baik ekonomi, pendidikan kesehatan, partisipasi dalam partai politik maupun di birokrasi.

Perempuan Papua, khususnya Perempuan Jayawijaya yang merupakan salah satu aset pembangunan daerah Jayawijaya juga memiliki keunikan sosial budaya dan pola hidup yang masih tergolong tradisional, serta mengalami berbagai macam permasalahan, secara khusus yang berkaitan dengan isu gender seperti masalah buta aksara yang sangat tinggi, yang ditunjukkan oleh angka melek huruf perempuan sebesar 82,8% dan laki-laki sebesar 66,7% , kematian bayi yang relatif tinggi yaitu 59 per 1.000 bayi. Sedangkan dari bidang ekonomi, keterlibatan perempuan dalam menunjang ekonomi keluarga berkisar 40% (BPS 2016).

Namun seringkali perolehan data yang valid mengalami kendala, sehingga untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dibutuhkan informasi dan data terpilah yang akurat tentang kondisi masyarakat mulai dari tingkat kampung sampai ke kabupaten. dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah benar-benar dilakukan berdasarkan data dan informasi yang menggambarkan kondisi riil masyarakat antara laki-laki dan perempuan, harus ada data terpilah karena hampir disemua daerah di Papua belum terdapat data terpilah untuk mendukung dalam pengambilan sebuah kebijakan. Penulis temukan beberapa permasalahan, seperti tidak tersedianya informasi dan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan geografis; kemudian masalah gender dan perempuan belum menjadi dasar pertimbangan pihak penentu kebijakan dan pengambil keputusan dalam menyusun program dan kegiatan yang dapat menjawab permasalahan ketidak-adilan dan ketidak-setaraan gender di Kabupaten Jayawijaya.

Dari hasil temuan di seluruh daerah survei, yakni enam distrik dan lebih khusus lagi di sepuluh kampung dan satu kelurahan, dengan menggunakan kuesioner, maka data lapangan yang diperoleh baik dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif

terfokus pada empat bidang prioritas yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Seluruh data tersebut dielaborasi ke dalam uraian di bawah ini.

1. Nilai Inti Pembangunan

Bertolak dari definisi pembangunan di Papua yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan tiga nilai inti pembangunan, yaitu:

a. Kecukupan (*Sustenance*)

Makna dari kecukupan disini bukan hanya terkait dengan makanan atau pakaian, tetapi lebih daripada itu adalah segala sesuatu yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia (sandang, pangan, papan, kesehatan dan keamanan). Hal ini telah dikemukakan dalam *Human Development Report* bahwa tujuan pembangunan adalah menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan kapabilitasnya.

b. Jati Diri (*Self Esteem*)

Setiap orang, apapun latar belakang sosialnya, akan berupaya mempertahankan jati dirinya. Karena bagi seorang manusia, jati diri jauh lebih berharga daripada harta kekayaan apapun yang dimilikinya di dunia ini. Seringkali terjadi konflik baik antarindividu, kelompok, ataupun etnis, hanya disebabkan karena ingin mempertahankan jati diri seseorang, keluarga, kelompok, etnis, atau organisasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Todaro (2000), bahwa dengan adanya kemajuan-kemajuan yang bersumber dari peradaban luar (yang negatif), dapat mengakibatkan terkikisnya jati diri suatu bangsa, sehingga nilai-nilai positif hilang dan tergantikan dengan hal negatif. Kebebasan ini juga mengarah kepada kebebasan terhadap berbagai alternatif pilihan yang tersedia, sehingga mampu memilih sesuatu dengan pikiran yang sehat dan jernih. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur Lewis, bahwa pertumbuhan ekonomi juga memiliki hubungan dengan aspek kebebasan. Arthur Lewis berteori bahwa pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi di perkotaan dan pedesaan, proses urbanisasi, polainvestasi dan sistem penetapan upah di sektor modern. Arthur Lewis mengasumsikan bahwa dalam perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu: a) Perekonomian tradisional; b) Perekonomian tradisional umumnya terdapat pada daerah pedesaan di mana tingkat

produktivitasnya masih rendah dengan sumber tenaga kerja yang tidak terbatas (surplus).¹

c. Kebebasan (*Freedom*)

Makna yang mendasar dari nilai pembangunan ini adalah kebebasan manusia, untuk dapat tegak berdiri tanpa diperbudak oleh pihak manapun atau oleh keinginan pengejaran material yang lebih banyak memiliki nilai negatif dijelaskan dalam buku Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga oleh Todaro (2000) bahwa sekali saja masyarakat tergiur dengan keinginan materialistis, maka akan diikuti dengan berbagai perilaku negatif. Sehingga menurut Todaro bahwa investasi memainkan peran penting dalam menggerakkan kehidupan ekonomi bangsa, karena pembentukan modal memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional maupun menciptakan lapangan kerja baru, dalam hal ini akan semakin memperluas kesempatan kerja.

Seperti pementingan diri sendiri, tidak ada kepedulian terhadap lingkungan manusia maupun alam sekitarnya.

2. Tujuan Inti Pembangunan

Merujuk kepada nilai pembangunan yang telah diuraikan di atas, maka kegiatan pembangunan baik di negara maju, negara berkembang maupun negara miskin, setidaknya harus memenuhi tujuan inti pembangunan. Adapun tujuan inti pembangunan terdiri dari:

¹ Surplus tersebut berkaitan dengan basis perekonomian yang tradisional dimana tingkat hidup masyarakat pada kondisi subsistem, akibat perekonomian yang subsistem pula. Hal ini ditandai dengan nilai produk marginal dari tenaga kerja yang bernilai nol, artinya fungsi produksi pada sektor pertanian telah sampai pada tingkat berlakunya *law of diminishing return*. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan input variabel (dalam hal ini tenaga kerja) justru akan menurunkan total produksi yang ada. Perekonomian modern umumnya terdapat di daerah perkotaan, di mana sektor yang berperan penting adalah sektor industri. Ciri perekonomian ini adalah tingkat produktivitas yang tinggi dari input yang digunakan, termasuk tenaga kerja dan juga sebagai sumber akumulasi modal. Hal ini menyiratkan bahwa nilai produk marginal terutama dari tenaga kerja bernilai positif sehingga fungsi produksi belum berada pada tingkat optimal. Dengan demikian industri perkotaan masih menyediakan lapangan pekerjaan dan para pekerja dari pedesaan dapat memperoleh pekerjaan tersebut dengan jalan urbanisasi. Pengkajian permasalahan di atas didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut: a) Perekonomian tertutup, tidak ada perdagangan internasional dan tidak ada modal asing; b) Tenaga kerja adalah satu-satunya faktor produksi yang bisa disesuaikan; c) Terdapat perubahan teknologi di sektor pertanian dan sektor industri; d) Hanya pemilik modal yang mampu menabung dan investasi; e) Terdapat pengangguran tidak kentara di sektor pertanian di mana sektor tenaga kerja menerima upah subsistem dan tabungan nol.

a. Peningkatan ketersediaan barang dan jasa

Ketersediaan barang dan jasa disini yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar setiap anggota masyarakat (pangan, sandang, papan dan juga keamanan).

b. Peningkatan standar hidup yang layak

Makna standar hidup layak disini, bukan hanya terkait dengan pendapatan, atau material. Tetapi lebih mendalam lagi, menyangkut perbaikan kualitas pendidikan, penyediaan lapangan pekerjaan, pengembangan nilai-nilai kultur, sehingga dapat mengangkat jati diri masyarakat dan bangsa.

c. Perluasan pilihan ekonomi dan sosial

Perluasan pilihan disini dimaksudkan agar setiap warga masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih sesuai keinginannya, dan terlebih tidak merasa diperbudak atau merasa tergantung kepada pihak lain.

B. Gender

1. Konsep Gender

Istilah gender diketengahkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan antara perempuan dengan laki-laki yang didasarkan pada ciptaan Tuhan dan pada hasil konstruksi sosial budaya. Dengan kata lain, gender merupakan suatu ciri manusia yang bersifat nonkodrati yang dapat berubah atau diubah dari waktu ke waktu. Secara konkret, hal ini dapat dilihat pada pembagian peran dan tanggung jawab yang selama ini dianggap paten melekat pada manusia laki-laki dan perempuan.²

Konsep gender pada konteks ini adalah perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat, dikonstruksikan oleh budaya, kebiasaan masyarakat dan akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Sedangkan konsep *sex* (kodrati) yang bersifat holistik dan universal, diciptakan oleh Tuhan dan tidak akan berubah. Konsep seks ini seringkali disalah-artikan karena ketidak-pahaman masyarakat dan kurangnya informasi ataupun karena sudah menjadi stereotip selama berabad-abad dan sudah membentuk *mindset* masyarakat, sehingga untuk mengubahnya membutuhkan suatu proses perubahan yang cukup panjang dan penuh perjuangan. Sebenarnya yang dikategorikan dalam konsep kodrati ini sebagai

² Bahan Pembelajaran Pengarusutamaan Gender, kerja sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan UNFPA, Jakarta, 2005

peran/fungsi/tanggung jawab yang tidak dapat dipertukarkan atau dialihkan dari laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya yakni hanyalah 4 M untuk perempuan; yakni Menstruasi, Mengandung, Melahirkan dan Menyusui dan 1 M untuk laki-laki yaitu Membuahi. Semua peran, tugas dan tanggung jawab lainnya dapat dialihkan atau digantikan dari satu jenis kelamin kepada jenis kelamin lainnya.

2. Strategi Pengarusutamaan Gender

Konsep pengarusutamaan gender (PUG) pertama kali muncul saat konferensi Perempuan Internasional ke IV di Beijing pada tahun 1995. PUG diterjemahkan dari Bahasa Inggris *gender mainstreaming* yang diartikan oleh berbagai lembaga ataupun individu sebagai berikut: PUG adalah sebuah strategi agar kebutuhan dan pengalaman perempuan dan laki-laki menjadi bagian yang tak terpisahkan dari desain, implementasi, *monitoring* dan evaluasi kebijakan dan program dalam seluruh lingkup sosial, ekonomi, politik, sehingga perempuan dan laki-laki sama-sama mendapatkan keuntungan, dan dapat menghapuskan ketidak-adilan gender hal ini dapat dikaitkan dengan Dewan Ekonomi dan Sosial yang terdiri atas 18 anggota dengan hak yang sama selama tiga tahun. Tugas Dewan Ekonomi dan Sosial adalah: a) Mengadakan penyelidikan dan menyusun laporan tentang soal-soal ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan di seluruh dunia; b) Membuat rencana perjanjian tentang soal tersebut dengan negara-negara anggota untuk diajukan kepada Majelis Umum; c) Mengadakan pertemuan-pertemuan internasional tentang hal-hal yang termasuk tugas dan wewenangnya. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Ekonomi dan Sosial ini dibantu oleh badan-badan khusus yang ada dalam Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PUG merupakan suatu cara untuk mengubah kebijakan, aturan main, praktik dan perilaku institusi khususnya di Indonesia dengan catatan seluruh tujuan, proses dan cara melakukannya dengan benar. Dengan kata lain, PUG dapat menghasilkan suatu kebijakan, program dan kegiatan baru yang berkontribusi terhadap keadilan dan kesetaraan gender melalui transformasi relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Menurut Sinta R. Dewi, dalam *Gender Mainstreaming Feminsme, Gender dan Transformasi Institusi* mengatakan bahwa gender merupakan peran antara laki-laki dan perempuan yang sangat berbeda, namun selama ini perempuan selalu diperlakukan tidak adil oleh kaum laki, sehingga tercipta adalah diskriminasi gender (Jurnal Perempuan 2006). PUG adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan

gender pada program dan kegiatan baik yang *tangible* (kasat mata) maupun yang *intangible* atau abstrak (Cleves 2007) .

Selanjutnya PUG menurut *Beijing Platform for Action* di Beijing Tiongkok tanggal 4-15 September 1995 adalah pemerintah dan berbagai pihak lain yang harus mempromosikan kebijakan *gender mainstreaming* secara aktif dan nyata terlihat dalam semua kebijakan dan program, sehingga sebelum keputusan diambil sudah menganalisis dampak kebijakan yang dimaksud terhadap perempuan dan laki-laki.

Gender Mainstreaming menurut *United Nations Economic and Social Council* (1997) adalah suatu proses memeriksa pengaruh perencanaan program dalam berbagai bidang terhadap perempuan dan laki-laki. Di mana Dewan Ekonomi dan Sosial mencatat dengan apresiasi laporan Sekretaris Jenderal tentang koordinasi kegiatan sistem PBB untuk pengarusutamaan perspektif gender ke dalam semua kebijakan dan program sistem PBB (E/1997/66). Negara-negara dengan suara bulat menyetujui pada Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan, yang diadakan di Beijing pada tahun 1995, bahwa penting untuk merancang, melaksanakan dan memantau, dengan partisipasi penuh perempuan, kebijakan dan program yang efektif, efisien dan saling memperkuat gender, termasuk pembangunan kebijakan dan program di semua tingkatan, untuk mendorong pemberdayaan dan kemajuan perempuan. Untuk memastikan implementasi yang efektif dari sasaran strategis Platform Aksi Beijing, sistem PBB harus mempromosikan kebijakan pengarusutamaan gender yang aktif dan terlihat. Mengakui kenyataan bahwa perspektif gender belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam arusutamaan kegiatan PBB, Dewan ingin mempromosikan kebijakan pengarusutamaan gender yang terkoordinasi dan koheren dengan lebih memperjelas konsep pengarusutamaan dan prinsip-prinsip utama yang terkait dengannya serta dengan menyampaikan rekomendasi spesifik kepada semua aktor dalam sistem PBB.

C. Peranan Perempuan dalam Pembangunan

Menurut Rini Rinawati (2004) dalam Jurnal Kajian Gender mengenai partisipasi wanita dalam pembangunan, partisipatif melalui pemberdayaan masyarakat mengatakan bahwa pada masa Kartini, kaum perempuan tidak memperoleh kebebasan sama sekali untuk terlibat dalam berbagai aktivitas, khususnya dalam kegiatan kemasyarakatan. Dalam hal pendidikan pun, kaum perempuan belum diperbolehkan untuk mengikuti

pendidikan baik pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi seperti halnya kaum laki-laki. Kini, kaum perempuan telah menikmati apa yang disebut persamaan hak atau emansipasi dalam berbagai aspek, baik pendidikan, sosial, ekonomi maupun politik.

Saat ini, globalisasi seringkali dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat, utamanya kaum perempuan. Namun sebaliknya, globalisasi ternyata membuat perempuan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ekonomi global. Globalisasi ternyata memberikan kesempatan yang positif terhadap perempuan, sebagaimana kesempatan yang sama diperoleh oleh masyarakat pada umumnya. Hanya saja yang acap menjadi persoalan adalah pemahaman yang salah mengenai globalisasi, yang diakibatkan oleh definisi globalisasi yang tidak akurat dan membuat berbagai emosi dan reaksi keras bermunculan.

Sebagian besar orang, seperti yang dipaparkan oleh James H. Mittelman, penulis *"Making Globalization Works for the Have Nots,"* berupaya menggunakan definisi mengenai globalisasi sesuai dengan kepentingan kelompok mereka masing-masing. Inilah yang mungkin salah satunya menyebabkan definisi mengenai globalisasi menjadi "longgar." Mereka yang memiliki fokus melakukan advokasi hak asasi manusia, lingkungan hidup, hak-hak perempuan, atau perdamaian dunia, acap berargumentasi bahwa globalisasi telah mengakibatkan atau turut berperan dalam perusakan lingkungan, penyebaran AIDS, atau tindakan terorisme. Suatu laporan yang dibuat oleh Bank Dunia bahkan mengklaim bahwa "serangan terorisme di Amerika Serikat pada tanggal 11 september adalah salah satu aspek globalisasi." Globalisasi menjadi sebuah kata yang memiliki arti beragam bagi semua orang. Berbagai tafsiran masyarakat terhadap globalisasi yang selama ini ternyata penuh dengan informasi yang salah meskipun sejumlah pihak menyatakan bahwa globalisasi berawal di era modern, beberapa pakar lainnya melacak sejarah globalisasi sampai sebelum zaman penemuan Eropa dan pelayaran ke Dunia Baru.

D. Peranan Wanita dalam Bidang Ekonomi

Oleh karena itu, di zaman sekarang terjadi banyak pergeseran, di mana hal tersebut bukan hanya kewajiban kepala keluarga bahkan wanita sebagai istri juga memiliki peran yang sama dalam mengisi pundi-pundi keuangan keluarga. Banyak kaum wanita yang berstatus sebagai istri rela menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) demi memenuhi

kebutuhan keluarga. Sehingga sering terdengar istilah “ tulang rusuk menjadi tulang punggung”. Meskipun beban yang mereka pikul tidak ringan, sering dilecehkan bahkan berbagai kekerasan yang sering mereka terima. Beberapa tahun yang lalu santer terdengar banyak TKW kita yang dipulangkan dengan berbagai masalah yang mereka hadapi. Penulis prihatin dengan kondisi yang menimpa para pejuang devisa kita.

Meskipun negara kita telah ada upaya pemberdayaan wanita, sudah ada Undang-Undang anti kekerasan terhadap wanita, akan tetapi hal tersebut belumlah maksimal. Masih banyak yang perlu dibenahi untuk mengangkat kedudukan wanita di negeri ini. Seperti kenyataan sekarang ini bahwa: Peranan wanita di tengah-tengah masyarakat pada masa-masa sekarang ini tidak lagi seperti peranan wanita pada masa-masa yang lampau, dengan suatu semboyan yang sudah tidak populer lagi yang menyatakan bahwa: Dengan kodratnya sebagai seorang wanita, maka statusnya adalah sebagai istri atau sebagai seorang ibu rumah tangga saja. yang pekerjaannya hanya melakukan kegiatan di rumah seperti memasak untuk keluarga, mencuci, mengasuh anak, mengatur dan membersihkan rumah, tetapi sekarang paradigma sudah berkembang. Sehingga kedudukan wanita telah sejajar dengan laki-laki dalam segala bidang kegiatan perekonomian.

Keterlibatan kaum wanita di dalam berbagai kegiatan ekonomi dalam masyarakat sekarang ini, seperti juga hal pada kegiatan sektor informal perkotaan, menunjukkan suatu kenyataan bahwa wanita di masa sekarang ini juga telah berperanan aktif. Dapat kita lihat sama seperti laki-laki di dalam berbagai tanggung jawabnya juga sama-sama sejajar dalam mencari nafkah guna meningkatkan taraf hidup keluarga. Pujiwati Sajogya (1985) dalam bukunya, Sosiologi Pembangunan adalah bahwa “Pergeseran pembagian kerja antara pria dan wanita dalam suatu rumah tangga, juga dapat mencerminkan akan perubahan peranan wanita dalam keluarga pada khususnya dan peranan wanita dalam masyarakat pada umumnya.” Merujuk dari berbagai uraian pendapat di atas, maka dapatlah menunjukkan bahwa peranan seorang wanita dalam rumah tangga, atau dalam masyarakat yaitu disamping sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga, juga sebagai anggota masyarakat yang peranannya telah sejajar dengan peranan laki-laki dalam berbagi kegiatan-kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya adalah untuk pencari nafkah demi meningkatkan taraf hidup keluarganya.”

METODOLOGI

A. Metode

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penulis melakukan penelitian dengan studi deskriptif karena sesuai dengan sifat masalah serta tujuan penelitian yang ingin diperoleh. Sugiyono (2005) metode deskriptif analitis merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Ciri-ciri metode deskriptif analitis dapat disimpulkan sebagai berupa sifat mengakumulasi data belaka, penelitian bergegas memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, kadang perlu pengujian terhadap hipotesis, digunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data, membuat prediksi dan implikasi dari suatu masalah yang diteliti.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data yang diperoleh dengan cara wawancara atau tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden, yaitu masyarakat sebagai obyek penelitian, dengan menggunakan kuesioner.

2. Data Sekunder

Sebagai data sekunder penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu menelusuri dan mencari data yang bersumber dari bahan-bahan pustaka yang erat relevansinya dengan judul dan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

C. POPULASI DAN SAMPEL

Berdasarkan banyaknya distrik di wilayah Kabupaten Jayawijaya yaitu: 39 distrik, maka 12 distrik digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Dari tiap distrik diambil dua kampung, sedangkan responden dari tiap kampung sebanyak 25 orang yang terbagi menjadi 15 responden perempuan dan 10 responden laki-laki. Adapun distrik yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Sebaran Sampel Penelitian

No.	Distrik	Kampung/Kelurahan	Responden		Keterangan
			L	P	
1.	Wamena Kota	Wamena	8	22	
		Kamma	10	9	
2.	Bolakme	Bolakme	20	30	
		Lani Timur	20	30	

3.	Walelagama	Walelagama	20	30	
		Siepkosi	20	30	
4.	Kurulu	Jikwa	20	30	
		Waga-waga	20	30	
5.	Asolokobal	Maima	3	23	
		Hulakima	5	20	
6.	Asologaima	Araboda	16	15	
		Piramid	X	X	
Total Responden			162	269	

Sumber: Tebay 2017

D. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah mengamati, mengumpulkan dan mengelompokkan data dan informasi yang terdapat di lapangan agar sesuai dengan indikator yang dipilih dan selaras dengan teori/ konsep yang sudah ditetapkan.

2. Pengamatan

Melakukan pengamatan terhadap kegiatan responden dan kegiatan-kegiatannya untuk melihat gejala yang muncul sehubungan dengan data yang akan diambil serta mempersiapkan instrumen survei dan wawancara-wawancara.

3. Wawancara

Melakukan tanya jawab dengan responden dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan anggota keluarga, ketenagakerjaan, alokasi penggunaan waktu kerja, pendidikan, kesehatan, kegiatan sosial kemasyarakatan serta keterlibatan dalam organisasi politik dan pemerintahan. Wawancara dilakukan terhadap responden di kampung-kampung pada setiap distrik yang terdiri dari 162 responden laki-laki dan 264 responden perempuan.

4. Studi Kepustakaan

Mempelajari hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh gambaran yang lebih konkret tentang profil perempuan serta konsep keadilan dan kesetaraan gender dari berbagai literatur lainnya.

E. Metode Analisis Data

Pembahasan dan kesimpulan yang merupakan output dari hasil penelitian ini akan semakin akurat apabila menggunakan metode dan alat analisis yang tepat dan benar.

Itulah sebabnya, untuk menganalisis data yang ada agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, penelitian akan menggunakan dua metode analisis yaitu:

a. Analisis Kualitatif

Analisis ini dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada secara teoritis dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menjabarkan hasil temuan sesuai dengan persoalan yang dianalisis atau diinterpretasi menyangkut hasil wawancara serta observasi/pengamatan berdasarkan data yang terkumpul dari kuisioner terstruktur.

b. Analisis Gender

Analisis gender adalah kegiatan-kegiatan yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran serta perempuan dan laki-laki, akses dan kontrol yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki atas sumber-sumber daya serta hasil kinerja mereka, pola relasi sosial antara perempuan dan laki-laki yang asimetris, dan dampak kebijakan program, proyek, kegiatan-kegiatan pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki. Analisis gender merupakan salah satu tahapan dalam proses pengarusutamaan gender (PUG). Analisis gender dapat memudahkan dalam menemu-kenali faktor-faktor kesenjangan gender yang dilihat dari aspek: akses, manfaat, peran dan kontrol, sehingga dapat menentukan alternatif intervensi yang tepat.

Ada beberapa teknik analisis yang dikenal dan digunakan dalam proses PUG, antara lain: metode Harvard, Moser, SWOT, GAP-POP dan Proba dan metode-metode lainnya. Dalam penelitian ini akan digunakan analisis Proba (*Problem Based Approach*). Analisis PROBA merupakan metode analisis gender hasil karya Bangsa Indonesia, yang disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) atas dukungan dari UNFPA (Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa). Analisis ini lebih menekankan pada identifikasi masalah kesenjangan gender dalam merumuskan program intervensi pemerintah yang tepat.

PEMBAHASAN

A. Pendidikan

Data bidang pendidikan menunjukkan bahwa jumlah sekolah yang didirikan di masing-masing kampung masih relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah anak usia sekolah pada masing-masing tingkatan pendidikan. Hal ini akan berdampak pada akses masyarakat, khususnya kaum perempuan, pada bidang pendidikan baik pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Begitu juga dengan terbatasnya guru yang mengajar di sekolah-sekolah mengakibatkan anak-anak tidak maksimal mendapatkan pengajaran.

Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden relatif sangat rendah, yakni responden yang berhasil menamatkan pendidikan SMA adalah perempuan sebanyak 5,9% dan laki-laki 5,4%. Sedangkan yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi hanya sebesar 1,4%. Bahkan sebagian besar responden di semua kampung tidak pernah bersekolah.

Hal ini mengakibatkan angka buta aksara khususnya perempuan di Kabupaten Jayawijaya tergolong cukup tinggi, terlebih pada daerah yang masih terisolir dan tidak memiliki sarana/prasarana transportasi. Kondisi ini telah mendorong pemerintah daerah untuk mengangkat masalah buta aksara menjadi salah satu program prioritas di tingkat kabupaten.

Oleh karena itu, masalah utama bagi perempuan Jayawijaya adalah rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan mereka sulit untuk berinteraksi dengan masyarakat luas, terutama dalam melakukan aktivitas ekonomi. Ini perlu mendapat perhatian khusus dari pihak pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan publik bidang pendidikan melalui kebijakan pemerintah. Sebab seringkali sekalipun sudah tercantum kegiatan PBA, namun sifatnya belum responsif gender. Artinya, program dan kegiatan yang direncanakan tidak didasarkan pada pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan masyarakat (perempuan dan laki-laki), sehingga akan berpengaruh kepada tahap pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak memberikan manfaat kepada masyarakat lelaki dan perempuan secara adil dan merata. Disamping itu juga akan berakibat pada penetapan anggaran yang buta dan bias gender.

Ketidakkonsistenan dalam siklus penyusunan perencanaan baik di tingkat perencana eksekutif maupun pada tingkat Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), disebabkan karena rendahnya pemahaman sebagian besar penentu kebijakan dan

pengambil keputusan tentang konsep dan isu gender di Kabupaten Jayawijaya, sehingga masih berpegang pada anggapan bahwa perempuan belum mampu untuk berpartisipasi dan berperan dalam program dan kegiatan pembangunan. Terlebih lagi, apabila ada anggapan bahwa perempuan belum layak sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan. Sehubungan dengan hal tersebut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari total responden (292 orang); 8,3 % kaum perempuan yang berusia 45 tahun ke atas tidak bersekolah dan laki-laki hanya sebanyak 0,3%. Jumlah perempuan yang berhasil menamatkan tingkat SD adalah sebanyak 30,3% dan laki-laki sebanyak 16%. Kemudian yang dapat menyelesaikan pendidikan SMP, perempuan sebanyak 13,8% dan laki-laki sebanyak 12,3%. Sedangkan untuk SMA, perempuan sebanyak 6% dan laki-laki 5,3%. Jumlah perempuan yang menamatkan Perguruan Tinggi, sebanyak 1,7% dan laki-laki sebanyak 1,0%.

Sedangkan jumlah anggota keluarga responden yang putus sekolah dan tamat SD berjumlah 408 dari 1.290 anggota keluarga responden 31,6%. Sedangkan jumlah anggota keluarga responden yang tamat SMP sebanyak 175 orang dari 1.290 anggota keluarga responden atau 13,6%. Jumlah anggota keluarga responden yang tamat SMA sebanyak 136 orang dari 1.290 anggota keluarga atau 10,5%. Selanjutnya jumlah anggota yang tamat Perguruan Tinggi sebanyak 33 orang dari 1.290 anggota keluarga atau 2,6%. Selain angka putus sekolah, masalah pendidikan yang sangat berpengaruh terhadap akses responden terhadap berbagai program pembangunan adalah tingginya angka buta huruf Kabupaten Jayawijaya sebesar 24,2%. Namun, berdasarkan hasil penelitian ini membuktikan bahwa telah terbuka kesempatan bagi perempuan untuk mengikuti pendidikan formal seperti pendidikan dasar sembilan tahun. Namun untuk pendidikan informal baik Keaksaraan Fungsional maupun pendidikan kesetaraan dan *lifeskills* yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun nonpemerintah belum tersedia di setiap kampung.

Beberapa penyebab tidak tersedianya pelayanan pendidikan informal, yakni diantaranya:

1. Sarana dan Prasarana Transportasi dari dan ke ibukota kabupaten maupun distrik/kampung sangat sulit terjangkau, sehingga akan berdampak pada alokasi dana kegiatan yang semakin besar.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana kegiatan dan juga waktu yang tersedia, sehingga sulit untuk menjangkau seluruh kampung dalam waktu satu tahun.
3. Kendala lainnya adalah ketersediaan waktu dari masyarakat, khususnya perempuan yang harus disesuaikan dengan kegiatan rutin rumah tangga maupun kegiatan sosial kampung lainnya.

Tingkat pendidikan responden nampaknya lebih baik jika dibandingkan dari tingkat orang tua responden, dimana sebagian besar orang tua mereka tidak pernah menduduki bangku sekolah. Kemudian jika dibandingkan antara ayah dan ibu responden, yang lebih banyak jumlahnya yang tidak bersekolah adalah kaum ibu. Bahkan dari angka rata-rata lama sekolah orang tua responden menunjukkan bahwa hanya sampai enam tahun. Disisi lain, dalam hal pendidikan informal responden, nampaknya sebagian besar baik laki-laki maupun perempuan tidak pernah mengikuti pendidikan informal. Namun, jika dikaji berdasarkan jenis kelamin berbeda dengan kegiatan Paket C, dimana hanya perempuan yang terlibat khususnya. Bahkan untuk kegiatan Pemberantasan Buta Aksara (PBA), tidak pernah diikuti oleh seluruh masyarakat.

B. Kesehatan

Faktor kesehatan masyarakat adalah salah satu indikator yang dapat dipakai untuk mengukur sampai sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah. Itulah sebabnya pada masyarakat yang masih hidup dengan pola makan tidak teratur, lingkungan yang masih belum memenuhi standar kesehatan, maka harus diketahui jenis penyakit yang diderita serta kandungan gizi yang ada pada makanan yang dikonsumsi seperti jenis dan jumlah lauk pauk. Tabel dibawah ini menunjukkan jenis penyakit yang diderita baik kaum perempuan dan kaum lelaki.

Tabel 2. Persentase Jenis Penyakit Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2017

JENIS PENYAKIT	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
MALARIA	36,3%	57,7%
ISPA	1,89 %	5,99 %
REMATIK	1,58%	5,68 %

KULIT	3,15%	3,64%
PARU2 BASAH	1,89%	0,95 %
MUNTAH BERAK	0,95%	0,63%
K.GAJAH	0	0,63 %
MAAG	0	0,32%

Sumber: Tebay 2017

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lokasi penelitian, dari sepuluh jenis penyakit yang sering diderita oleh responden baik perempuan maupun laki-laki, masih didominasi oleh penyakit malaria (98%), khususnya oleh kaum perempuan (57,7%) dan laki-laki sebesar 36,3%. Selanjutnya diikuti oleh penyakit rematik, muntah berak, serta penyakit kulit. Hal ini menunjukkan bahwa penyakit malaria merupakan penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat di Kabupaten Jayawijaya. Bahkan 90% penyebab kematian pada masyarakat disebabkan oleh penyakit malaria.

Dari sisi pola makan, hasil survei menunjukkan bahwa perempuan 28,5% dan laki-laki 20,1% memiliki pola makan tiga kali sehari dan konsumsi makanan terdiri atas makanan pokok diimbangi dengan lauk dan pauk berupa ikan, sayur, daging dan sebagian kecil mengonsumsi tahu, tempe dan telur. Disisi lain, kebiasaan masyarakat Jayawijaya, makan hanya dua kali sehari, yakni makan dilakukan pada waktu pagi hari sebelum ke kebun, siang dan sore atau malam hari setelah pulang dari kebun. Hal ini banyak dilakukan oleh perempuan (20,8%) dan laki-laki (14,6%). Biasanya masyarakat Dani pada pagi hari telah membawa bekal erom atau ubi yang dibakar dan mereka akan makan pada siang hari dikebun atau tempat kerja mereka.

Makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari adalah makanan yang sesuai dengan kondisi alam setempat seperti misalnya, ubi-ubian, jagung, keladi. Sementara sayur-mayur kebanyakan yang dikonsumsi adalah daun ubi jalar dan pada umumnya mereka mengolah dengan cara bakar batu dan juga dibakar biasa. Namun, saat ini sebagian besar masyarakat juga telah mengonsumsi makanan pokok ditambah pula dengan nasi. Hal ini disebabkan karena angka migrasi masuk dan keluar cukup tinggi, sehingga memicu tingkat mobilitas penduduk yang cenderung meningkat dari tahun ke

tahun, sehingga memengaruhi pola hidup masyarakat, termasuk di dalamnya pola konsumsi juga mengalami transisi.

Dengan kondisi geografis yang ada, hal ini juga dapat menimbulkan masalah baru. Sebagai contoh, ketika musim angin barat, angin kurima mengakibatkan cuaca dingin dan berpengaruh pada lahan tanam mereka. Juga kadang curah hujan yang tinggi mengakibatkan Sungai Baliem meluap dan terjadi banjir. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi kondisi tersebut, masyarakat perlu dimotivasi untuk tetap melakukan aktivitas pertanian/perkebunan makanan pokok lokal.

Selain itu, jenis laukpauk yang dikonsumsi masyarakat Jayawijaya sangat bervariasi; antara lain: daun ubi jalar atau daun erom (perempuan 49,1% dan laki-laki 31,9%), daun sayur hitam, sawi putih, sawi hijau (perempuan 57,5% dan laki-laki 27,3%), bayam, brokoli, paprika (perempuan 36,0% dan laki-laki 28,5%), kacang-kacangan, wortel, kol dan kentang (perempuan 21,3% dan laki-laki 13,4%). Disamping itu, sebagian kecil masyarakat mengonsumsi genemo, daun pepaya dan daun katuk. Sedangkan untuk lauknya, sesuai dengan pemilikan sumber daya alam; yakni daerah sungai dan pegunungan, maka sebagian besar masyarakat mengonsumsi udang dan ikan dari hasil tangkapan disungai dan hasil budidaya masyarakat (perempuan 43,9% dan laki-laki 30,8%), kelinci (perempuan 24,9% dan laki-laki 14,0%), daging (perempuan 22,7% dan laki-laki 16,7%).

Jika mengamati pola makan lauk-pauk masyarakat per kampung di Kabupaten Jayawijaya, terdapat perbedaan pada pola konsumsinya; yakni dipengaruhi oleh masing-masing latar belakang budaya, pemilikan sumber daya alam dan lingkungan. Masyarakat Dani dilembah Baliem, baik laki-laki maupun perempuan, cenderung mengonsumsi daging babi, kelinci, binatang hasil buruan. Ketersediaan air bersih bagi responden masih sangat kurang. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari, 85% responden masih menggunakan air kali dan air hujan untuk memasak dan mandi. Sedangkan sisanya, 10% menggunakan air sumur dan 5% menggunakan air PAM. Selanjutnya, ketersediaan kamar mandi dan WC (*water closet*) juga masih sangat terbatas.

Tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu (Puskesmas Pembantu) dalam memeriksa kesehatan baik ibu hamil maupun anak-anak sangat tinggi. Hasil pengamatan dilapangan membuktikan bahwa 30% masyarakat maupun ibu hamil pergi ke

Puskesmas atau Pustu untuk memeriksa kesehatan mereka. Namun demikian, masih banyak masyarakat maupun ibu hamil yang memeriksa dan melakukan persalinan mereka di kediaman dukun kampung dan dengan obat tradisional.

Tingkat kesadaran masyarakat dalam hal pemeriksaan kehamilan di Kabupaten Jayawijaya masih relatif rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran mayoritas kaum perempuan disana, juga faktor keterbatasan tenaga medis dan rendahnya tingkat pendidikan serta sulitnya jangkauan kepusat layanan kesehatan yang tersedia. Tetapi, sudah ada langkah maju dari PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), Kantor Pemberdayaan Perempuan, lembaga nonpemerintah dan lembaga internasional, yang terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya perawatan kesehatan reproduksi bagi kesehatan ibu dan anak, dan juga kesehatan seluruh anggota rumah tangga. Kedepan diharapkan akan berjalan baik sehingga bisa menekan angka kematian ibu dan anak saat melahirkan. Demikian juga dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan imunisasi bagi anak-anaknya yang cenderung cukup rendah. Jika dilihat dari jenis imunisasi, maka suntikan Polio rata-rata dilakukan oleh sebagian besar responden. Sedangkan Campak kurang dilakukan, hanya dilakukan beberapa tempat. Pelayanan imunisasi sebagian dilakukan melalui program Posyandu di masing-masing kampung atau pada tingkat distrik.

C. Ekonomi

Kegiatan ekonomi sebagai sumber pendapatan keluarga merupakan aktivitas yang sangat penting dan mendesak. Karena hal inilah yang dapat menjadi salah satu alat ukur tingkat kesejahteraan keluarga. Namun, jika tidak didukung oleh ketersediaan lahan maupun sumberdaya penunjang lain yang dimiliki oleh masyarakat lokal, maka tingkat kesejahteraan masyarakat semakin sulit untuk tercapai.

Pembahasan selanjutnya dari hasil penelitian ini akan menguraikan apa saja kegiatan produksi, alokasi jam kerja, sumber dan besarnya modal yang digunakan, lokasi pemasaran, jarak tempuh ke lokasi pemasaran, transportasi yang digunakan serta berapa besar pendapatan yang diperoleh masyarakat dari hasil penjualan produksi mereka.

Kegiatan produksi utama yang dilakukan oleh masyarakat Jayawijaya adalah di bidang pertanian dan berkebun serta bercocok tanam, perikanan, dan peternakan. Berdasarkan pengamatan pada lokasi penelitian, 1,9% kegiatan produksi sebagai

pencari udang dan ikandi Sungai Baliem dilakukan oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki sebesar 16,1%. Kegiatan produksi pertanian yang dilakukan oleh kaum perempuan 34,1% dari total responden sedangkan laki-laki 16,7%. Selanjutnya responden yang berprofesi sebagai peternak 0,9% perempuan dan laki-laki 0,6%. Usaha pangan yang dilakukan oleh perempuan 1,27%. Kegiatan pertukangan yang dilakukan oleh laki-laki 0,32%. Sedangkan yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil laki-laki dan perempuan sebesar 0,32%. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan setiap hari, dengan pola kerja dan tanggung jawab yang sudah terbagi antara laki-laki dan perempuan.

Namun demikian, aktivitas berburu lebih banyak dikerjakan oleh kaum laki-laki, sedangkan berkebun dan bercocok tanam dilakukan oleh kaum perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 75% aktivitas berkebun dikerjakan oleh perempuan dengan alokasi waktu pada aktivitas berkebun bagi perempuan selama 1 minggu rata-rata sebanyak 54 jam, mulai dari pagi sampai sore hari atau menjelang malam. Untuk dapat melakukan kegiatan produksi yaitu berburu, berkebun, beternak, usaha pangan, pertukangan, tentu dibutuhkan modal untuk membeli peralatan nelayan, pertanian dan bibit tanaman, ternak dan modal untuk pertukangan. Dari hasil wawancara didapati bahwa sumber modal berusaha berasal dari responden sendiri. Disini terlihat bahwa responden belum menggunakan sumber permodalan dari institusi keuangan (perbankan dan koperasi), hasil penelitian menunjukkan bahwa 98% sumber modal adalah dari masyarakat sendiri. Begitupun dengan besaran modal untuk membiayai kegiatan produksi masyarakat relatif masih kecil.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, 90% modal yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan produksi masyarakat yakni berkisar antara Rp200.000 sampai Rp500.000. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan produksi nelayan, berkebun, beternak, berburuh, usaha pangan dan pertukangan masyarakat adalah harus tersedianya lokasi/tempat untuk memasarkan hasil produksi masyarakat yaitu pasar, disamping perlu juga memperhatikan akses untuk dapat memasarkan hasil produksi, maupun sarana yang dipergunakan untuk memasarkan produksi. Semuanya ini akan berdampak pada hasil yang akan diterima oleh masyarakat sebagai pendapatan mereka.

Hasil kajian menunjukkan bahwa lokasi pemasaran hasil produksi masyarakat adalah 70% dipasarkan di kampung sendiri dan selebihnya dipasarkan ke ibukota

distrik dan ibu kota kabupaten dengan jarak tempuh dari kampung ke ibukota distrik dan ibu kota kabupaten antara 5 km – 60 km. Transportasi yang digunakan adalah 70% menggunakan sepeda motor untuk memasarkan ke ibukota kabupaten dengan jarak tempuh antara 20 km – 60 km. Dalam memasarkan hasil produksi, tidak dilakukan setiap hari, melainkan ada waktu-waktu tertentu yang sudah ditentukan sebagai hari pasar sehingga waktu yang dialokasikan untuk memasarkan hasil produksi masyarakat adalah 2-3 hari/minggu.

Dari penjualan hasil produksi masyarakat, pendapatan yang diterima adalah relatif sangat kecil. Dari hasil wawancara yang dilakukan ke 292 responden, serta hasil pengamatan pada lokasi penelitian, 80% pendapatan bersih yang diterima dari satu kali hasil penjualan adalah berkisar antara Rp20.000 hingga Rp50.000, sehingga rata-rata pendapatan masyarakat selama seminggu adalah berkisar antara Rp80.000 hingga Rp150.000. Apabila dibandingkan dengan tingkat kemahalan pada kondisi ekonomi seperti saat ini, maka sudah tentu akan sangat sulit bagi masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Indikator lainnya yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah tingkat kepemilikan rumah. Hasil kajian memperlihatkan bahwa tingkat kepemilikan rumah oleh setiap keluarga relatif kecil. Bahkan data memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat di Kabupaten Jayawijaya tinggal di rumah honai yang dimiliki oleh masyarakat.

D. Sosial

Aktivitas sosial kemasyarakatan yang menjadi penekanan dalam penelitian ini adalah menyangkut keterlibatan responden pada kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial, adat, kegiatan politik maupun peluang untuk memberikan pendapat pada setiap pertemuan atau kegiatan yang dilakukan baik di tingkat kampung maupun dalam lingkungan masyarakat. Jika ditinjau dari keterlibatan masyarakat dalam organisasi sosial, maka dapat dikatakan bahwa 80% perempuan terlibat dalam kegiatan keagamaan dan PKK. Sedangkan laki-laki 52% terlibat dalam kegiatan organisasi sosial, khususnya kegiatan keagamaan. Demikian juga dengan keterlibatan perempuan dalam organisasi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laki-laki lebih dominan (85%) didalam organisasi politik dibandingkan dengan perempuan (15%). Hal ini disebabkan karena beban kerja

perempuan dalam lingkup domestik jauh lebih banyak daripada laki-laki, sehingga menyita waktu dan tenaga perempuan.

KESIMPULAN

Dari penelitian di atas ini dapat disimpulkan bahwa keterlibatan perempuan Suku Dani dalam pembangunan di Kabupaten Jayawijaya jika dilihat dari empat aspek pembangunan yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Maka hasilnya menunjukkan bahwa perempuan Suku Dani jika dilihat dari tingkat pendidikan hanya 15% perempuan Suku Dani yang menamatkan Pendidikan diberbagai jenjang pendidikan yang ada, sedangkan untuk laki-laknya sebanyak 85%. Kemudian pada bidang kesehatan dari sepuluh jenis penyakit yang sering diderita dan dilihat dari penggunaan fasilitas kesehatan yang ada, maka menunjukan bahwa jumlah penderita dan pengguna fasilitas kesehatan adalah sama yaitu 50% perempuan dan laki-laknya juga 50%. Di bidang ekonomi, kegiatan produksi utama yang dilakukan oleh responden adalah bercocok tanam dan hasilnya dijual di pasar setempat maupun di ibukota Kabupaten Wamena disini terlihat bahwa aktifitas ekonomi kaum perempuan lebih dominan yaitu, 70% dan sementara ada 30% yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Sementara pada bidang sosial kemasyarakatan keterlibatan perempuan ada 80% dan laki-laki hanya 20% saja. Keterlibatan perempuan dalam organisasi politik hanya berkisar 15% dibandingkan laki-laki sebanyak 85%. Hal ini disebabkan karena beban kerja perempuan dalam lingkup domestik jauh lebih banyak dari pada laki-laki, sehingga menyita waktu dan tenaga perempuan. Dengan demikian maka penelitian ini menunjukkan bahwa keikutsertaan perempuan Suku Dani dalam empat aspek pembangunan ini masih sangat rendah. Disisi lain juga pemerintah belum memiliki data terpilah antara perempuan dan laki-laki guna menunjang pembangunan di Kabupaten Jayawijaya, sehingga *gap* antara perempuan dan laki-laki bisa dipetakan lewat berbagai program.

REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. "Membangun Desa Partisipatif". Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lewis, Artur. 1954. *Economic Development with Unlimited Supplies and Labour*. England: Manchester School.

- Darsono S, Ahmad. 2008. "Pendidikan Perempuan Warga Miskin di Daerah Tertinggal" dalam *Jurnal Perempuan* 59.
- Dewi, Sinta R. 2006. "Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Program Pemerintah" dalam *Jurnal Perempuan* 50.
- Mittelman, James H. 1997. *The Dynamics of Globalization. In: Globalization: Critical Reflections*. London: Lynne Reinner Publishers, pp. 1-19.
- Mohamad, Kartono. 2007. "Kesehatan Reproduksi Sebagai Hak" dalam *Jurnal Perempuan* 53.
- Nurhayati, Elli, et. All. 2006. "Gender di Mata Birokrat, Hasil Penelitian Persepsi Pembuat Kebijakan di DIY tentang Gender". Yogyakarta: Rifka Annisa dan Ford Foundation.
- Sajogyo, Pudjiwati. 1985. "Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa". Jakarta: CV Rajawali.
- Silawati, Hartian. 2006. "Integrasi Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan Daerah" dalam *Jurnal Perempuan* 50.
- Van Dis, Adriaan. 1991. *Women and Poverty. Jurnal Gender in Perspective* 21.
- Rini Rinawati. 2004. "Partisipasi Wanita dalam Pembangunan" dalam *Mimbar Jurnal Universitas Islam Bandung* Vol. XX (Juli-September 2004, pp. 387-405).
- Sugiyono. 2005. "Statistik untuk Penelitian". Bandung: Alfabeta
- _____. 2006. "Metode Penelitian Pendidikan". Bandung: Alfabeta.
- Todaro, Michael P. 2000. "Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga". Jakarta: Erlangga.
- _____. 2005. "Bahan Pembelajaran Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Kesehatan". Jakarta: Kerja sama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan UNFPA.
- _____. 2007. "Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Kesehatan". Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- _____. 2008. "Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Tingkat Pelayanan Dasar". Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Badan Pusat Statistik. 2016. "Indonesia dalam Angka"
- Badan Pusat Statistik Papua. 2016. Jayawijaya dalam Angka.